

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam Bab IV ini akan di sampaikan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang kaitan dengan penelitian yaitu berkaitan dengan Implementasi kebijakan pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul tahun 2010. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, maka kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Implementasi Kebijakan pengadan pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul tahun 2010 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari dapat dilaksanakan dari perencanaan dan persiapan, pendaftaran peserta, pelaksanaan seleksi administrasi, pelaksanaan seleksi ujian tulis, pelaksanaan seleksi psikotest, pengumuman hasil seleksi, pemberkasan, pengusulan Nomor Identitas Pegawai (NIP), pengangkatan menjadi CPNSD dan penempatan serta penugasan CPNSD pada unit kerja. Hal ini telah sesuai dengan tujuan yang akan di capai, yang dibuktikan dengan adanya pegawai negeri sipil yang diterima sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dari 192 formasi yang dibutuhkan terdapat 189 orang peserta yang dinyatakan diterima. Sedangkan 2 formasi tidak ada peminatnya, formasi tersebut adalah Guru SMK – Seni Musik kualifikasi pendidikan S-1 Seni Musik program Studi Musik Tiup Logam, dan Guru SMK – Seni Musik kualifikasi pendidikan S-1 Seni Musik program Studi Musik gesek dan 1 formasi yang kosong (tidak ada pengganti) hal ini dikarenakan tidak

ada kandidat peserta pengganti karena ada yang mengundurkan diri, formasi yang kosong adalah 1 Guru SMA Bahasa Jawa.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul tahun 2010 adalah:

a. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang efektif yang dilakukan pihak-pihak pelaksana yang terkait dengan pengimplementasian pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul. Komunikasi diwujudkan dengan adanya sebuah koordinasi atau sistem kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pencapaian kebijakan. Dalam hal ini peran BKD sebagai organisasi pelaksana pengadaan pegawai telah berjalan dengan baik dari tahap perencanaan sampai tahap pengangkatan pegawai yang diterima. Permasalahan kurangnya komunikasi dengan instansi pendidikan dapat dilihat dari terdapatnya dua formasi yang tidak ada peminatnya.

b. Sumber Daya Manusia

BKD Sebagai organisasi pelaksana mempunyai sumber daya yang sudah baik hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai BKD sebagian besar adalah berpendidikan S1. Dalam implementasi kebijakan pengadaan pegawai keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pegawai sehingga mendukung dalam

### c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana ini berkaitan dengan kemauan dan motivasi pihak-pihak pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengadaan pegawai. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul tahun 2010, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan pegawai yaitu BKD sebagai organisasi pelaksana, aparat satpol PP dan aparat kepolisian telah menjalankan kewajiban sesuai kewenangan masing-masing. Sikap seperti ini yang mendorong terlaksananya kebijakan pengadaan pegawai negeri sipil di Kabupaten Bantul.

### d. Organisasi Pelaksana

BKD kabupaten Bantul sebagai Ketua pelaksana pengadaan pegawai berperan sebagai lembaga pelaksana kebijakan didukung oleh Kantor Pengolahan Data dan Telematika Kabupaten Bantul sebagai pendukung teknologi informasi, Satpol PP dan aparat kepolisian sebagai organisasi pengamanan implementasi kebijakan terhadap perijinan dan pencurian soal ujian dan pengawasan pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil dilakukan oleh Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta dan Tim Monitoring dari Inspektoriat Kabupaten Bantul yang diketuai oleh Kepala

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang tahapan dan syarat-syarat pengadaan pegawai negeri melalui media massa untuk meminimalisir terjadinya penipuan
2. Permasalahan/kendala/hambatan yang ditemui pada pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantul tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya selayaknya dijadikan sebagai pengalaman berharga, guru yang paling menyakinkan, sehingga tidak boleh terulang lagi.
3. Perlunya peningkatan kerjasama dengan universitas dalam memberikan informasi terkait pengadaan pegawai sehingga tidak ada lagi formasi yang sepi peminat atau tidak ada peminat sama sekali.
4. Banyaknya peserta yang mengundurkan diri dan lebih memilih diterima ditempat lain mengindikasikan bahwa komitmen peserta untuk mengabdikan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantul sangat rendah oleh karena itu, untuk lebih memastikan komitmen peserta diperlukan surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila diterima sebagai PNS di Kabupaten Bantul